



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-1018.KP.10.02 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MADYA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penetapan angka kredit Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
  - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
  - 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1103/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Penyuluh Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

**Tembusan:**

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-1018.KP.10.02 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Juni 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	RUDY SUSATYO, S.IP., M.Si. NIP. 197002181991031003	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	415,52
2.	HAFRILINDA, S.H. NIP. 196510131992032001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	411,37
3.	MIRNA TIURMA ALVERNIA, S.E., M.M. NIP. 198103082009122002	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	410,04
4.	YULIATI, S.H. NIP. 197206051993032002	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	407,54
5.	IRWAN KUSDIHARTO, S.H., M.H. NIP. 197308051997031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	405,08
6.	AFRA NURLESTARI, S.H., M.H. NIP. 198110102002122001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	404,89
7.	NOVITA ASTI KARTIKA RINI, S.H. NIP. 197911082006042001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	404,39

1	2	3	4	5	6
8.	MELDA SULASTRIYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197707182002122001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	401,79
9.	RUSMIATI, S.H. NIP. 196908181991032001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	400,40

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YASONNA H. LAOLY